DAFTAR HADIR

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1	IR. HIT SAMPOUW. Dip HE WEDGES SDA Sulat	Good of
Z.	H:deki ARAKI (JICA Study Team)	洪十青村
	Makoto EUDÁMA CILA STUDSTEEM POISTON S NE BOSON JITSUMIRO RINY HATTON SUGIARTO. J. WIDAGDO. FRYNARMAN (JILA STU) DAVE MUCHAIMIN Margy Dolvlong	Bin- China Living
12.	,	Duony.

D5.7 Decree of EIA Evaluation Commission



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (A M D A L)

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 57 Gorontalo Telp. 0435 – 821277 Fax. 0435 – 828281

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PROVINSI GORONTALO

Nomor 02 TAHUN 2002

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN KEGIATAN PENGENDALIAN BANJIR DI DAS LIMBOTO-BOLANGO-BONE PROVINSI GORONTALO OLEH JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) DAN DINAS PU/KIMPRASWIL PROVINSI GORONTALO

KETUA KOMISI PENILAI AMDAL PROVINSI GORONTALO,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan penilaian Komisi Penilai AMDAL Provinsi Gorontalo, Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pengendalian Banjir di DAS Limboto-Bolango-Bone oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Dinas PU/KIMPRASWIL Provinsi Gorontalo, dapat disetujui sesuai hasil rapat tanggal 29 Agustus 2002;
- b. bahwa hasil studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Gorontalo tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pengendalian Banjir di DAS Limboto-Bolango-Bone Provinsi Gorontalo oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Dinas PU/KIMPRASWIL Provinsi Gorontalo

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

- Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
 - Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Danipak Lingkungan Hidup;
 - Keputusan Gubernur Gorontalo No. 231 Tahun 2002 tentang Pembentukan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis AMDAL Provinsi Gorontalo:
 - Hasil rapat Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Gorontalo pada tanggal 29 Agustus 2002 mengenai Penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Proyek Pengendalian Banjir di Wilayah DAS Limboto-Bolango-Bona oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Dinas PU/KIMPRASWIL Provinsi Gorontalo;
 - Laporan Hasil Penilaian AMDAL Pengendalian Banjir di DAS Limboto, Bolango, Bone Provinsi Gorontalo Tahun 2002 oleh Tim Teknis AMDAL Provinsi Gorontalo pada tanggal 22 September 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA:

Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pengendalian Banjir di Das Limboto-Bolango-Bone Provinsi Gorontalo Oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Dinas PU/Kimpraswil Provinsi Gorontalo.

KEDUA

Kelayakan Lingkungan Kegiatan Proyek Pengendalian Banjir di Wilayah DAS Limboto-Bolango-Bone oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Dinas PU/KIMPRASWIL Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mengandung arti bahwa dalam kegiatan Proyek Pengendalian Banjir di Wilayah DAS Limboto-Bolango-Bone oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Dinas PU/KIMPRASWIL Provinsi Gorontalo, adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup,

KETIGA

Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Dinas PU/KIMPRASWIL Provinsi Gorontalo dalam melakukan kegiatannya wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah diselujui,
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Gorontalo, Walikota Gorontalo dan Bupatii Gorontalo setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT:

Instansi pemberi ijin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban, baik yang tertulis dalam Keputusan ini maupun di dalam Rencana Pengelelaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam ijin melakukan kegiatan Proyek Pengendalian Banjir di Wilayah DAS Limboto-Bolango-Bone Provinsi Gorontalo.

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

Apabila di kemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada instansi yang tercantum dalam diktum KETIGA butir 2 (dua) untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

KEENAM

Apabila dilakukan perluasan, pemindahan dan/ atau perubahan rencana kegiatan sehingga dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan lingkungan hidup rencana kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan studii Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) yang baru.

KETUJUH :

Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Dinas PU/KIMPRASWIL Provinsi Gorontalo dalam persetujuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

KEDELAPAN :

Biaya yang diakibatkan oleh adanya keputusan ini dibebankan kepada Proyek Perencanaan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup BAPPPEDA Provinsi Gorontalo dana ABT Tahun 2002.

KESEMBILAN :

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dikemudian hari akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo Pada tanggal: 23 September 2002

KOMISI PENILAYAMDAL PROVINSI GORONTALO KETUA.

NAR ISMAIL

Tembusan.

Kepada yang terhormat:

Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta

Bapak Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta Bapak Menteri PU dan Kimpraswil di Jakarta Bapak Gubernur Gorontalo di Gorontalo

Bapak Walikota Gorontalo di Gorontalo

Bapak Bupati Gorontalo di Limboto Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan di Jakarta Tim Japan International Cooperation Agency (JICA)

Arsip.

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

APPROVAL LETTER OF ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS (IN ENGLISH)

GOVERNMENT OF GORONTALO PROVINCE **EVALUATION COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS** (EIA)

General Sudirman Street No. 57 Gorontalo, Phone 0435-821277 Fax 0435-828281

CHAIR OF EVALUATION COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS. GORONTALO PROVINCE DECREE

NO. 02, 2002

ON

ENVIRONMENTAL SUITABILITY OF FLOOD CONTROL ACTIVITY IN LIMBOTO-BOLANGO-BONE (LBB) BASIN, GORONTALO PROVINCE

BY JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) AND DINAS PU/KIMPRASWIL, GORONTALO PROVINCE

THE CHAIR OF EVALUATION COMMITTEE ON

ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS (EIA), GORONTALO PROVINCE,

- Considering: a. that based on the evaluation made by AMDAL Evaluation Committee, Gorontalo Province, the Environmental Impact Analysis (ANDAL), Environmental Management Plan (RKL), and Environmental Monitoring Plan (RPL) on flood control in LBB Basin conducted by Japan International Cooperation Agency and Dinas PU/KIMPRASWIL, Gorontalo Province, can be approved according to the committee meeting result on 29 August 2002:
 - b. that the results of Environmental Impact Analysis, Environmental Management Plan, and Environmental Monitoring Plan need to be established by a decree from the Chair of AMDAL Evaluation Committee, Gorontalo Province:
 - c. that based on consideration stated in points a. and b., decree from the Chair of AMDAL Evaluation Committee, Gorontalo Province on Environmental Suitability of Flood Control in Limboto-Bolango-Bone Basin, Gorontalo Province conducted by Japan International Cooperation Agency (JICA) and Dinas PU/KIMPRASWIL, Gorontalo Province need to be established;

further

- Considering: 1. The Law No. 5 (1990) on Biological natural Resource Conservation and its Ecosystem (State Document No. 49, 1990, addition to State Document No. 3419),
 - 2. The Law No. 24 (1992) on Spatial Planning (State Document No. 115, 1992, addition to State Document No. 3501),
 - 3. The Law No. 23 (1997) on Environmental Management (State Document No. 68, 1997, addition to State Document No. 3699),
 - 4. The Law No. 22 (1999) on Regional Government (State Document No. 60, 1999, addition to State Document No. 3839),

- **5.** Government Regulation No. 27 (1999) on Environmental Impact Analysis (State Document No. 59, 1999, addition to State Document No. 3838),
- 6. Government Regulation No. 10 (2000) on Environmental Impact Management Board.

further

- Considering: a. Decree of Environmental Ministry No. 17/Men-LH/02/2001 on Types of Activities that Required Environmental Impact Analysis,
 - b. Decree of Board of Environmental Impact Control Chair No. 9 (2000) on Community Involvement and Information Transparency during the EIA Process,
 - c. Decree of Board of Environmental Impact Control Chair No. 231 (2002) on Environmental Impact Analysis Arrangement Guideline,
 - d. Decree of Governor No. 231 (2002) on Establishment on Evaluation Committee and EIA Technical Team in Gorontalo Province.
 - e. Minutes of Gorontalo Province EIA Evaluation Committee Meeting, 29 August 2002 on Environmental Impact Analysis, Environmental Management Plan, and Environmental Monitoring Plan of Flood Control Project in Limboto-Bolango-Bone Basin conducted by Japan International Cooperation Agency (JICA) and Dinas PU/KIMPRASWIL, Gorontalo Province,
 - f. Minutes of evaluation on Environmental Impact Analysis of Flood Control Project in Limboto-Bolango-Bone Basin carried out by Gorontalo Province Environmental Impact Analysis Technical Team, 22 September 2002.

TO DECREE

FIRST

Environmental suitability of Flood Control Activity in Limboto-Bolango-Bone Basin, Gorontalo Province conducted by Japan International Cooperation Agency (JICA) and Dinas PU/KIMPRASWIL, Gorontalo Province.

SECOND

Environmental suitability of Flood Control Activity in Limboto-Bolango-Bone Basin, Gorontalo Province conducted by Japan International Cooperation Agency (JICA) and Dinas PU/KIMPRASWIL, Gorontalo Province stated in the FIRST dictum means that the Flood Control Project Activities in Limboto-Bolango-Bone Basin, Gorontalo Province conducted by Japan International Cooperation Agency (JICA) and Dinas PU/KIMPRASWIL, Gorontalo Province is suitable according to environmental viewpoint.

THIRD

Japan International Cooperation Agency (JICA) PU/KIMPRASWIL, Gorontalo Province are required to accomplish and to obey the following procedures during their activities:

To perform environmental management and monitoring measures as written in the approved Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan Documents,

To report the results of perform environmental management and monitoring measures to Environmental Impact Management Board (BAPEDAL), Home Affair Minister of Republic Indonesia, Governor of Gorontalo, Walikota Gorontalo, and Bupati Kabupaten Gorontalo every six (6) months from the time this decree is signed.

FOURTH : The approving authorities are required to include all requirements and

obligations, which are not only written in this decree but in Environmental Management and Monitoring Plans, as well as regulations in permitting the

flood control activities in LBB basin, Gorontalo Province.

FIFTH : If in the future case there will be any unpredicted and uncontrolled

environmental impacts, which are not described in the approved environmental management and monitoring documents, taking place; the project operator must immediately report the impacts to the institutions mentioned in the THIRD dictum points two (2), to determine any further

necessary steps.

SIXTH : If the flood control project activities require any extension, relocation, or

change, whose impacts are not assessed and described in the approved environmental management and monitoring documents, then *a new*

Environmental Impact Analysis (EIA) must be accomplished,

SEVENTH: Any failure or violation acted by the Japan International Cooperation

Agency (JICA) and Dinas PU/KIMPRASWIL, Gorontalo Province upon this

endorsement may be penalized according to the law.

EIGHT : Any expense for issuing this decree is charged to The Environmental Impact

Plan and Control Project, Regional Planning and Developing Board (Bappeda), Gorontalo Province, namely fund from additional budget (ABT).

NINETH: Any mistakes written in this decree must be in the future corrected

accordingly.

Decreed in Gorontalo
On September the 23rd 2002

AMDAL EVALUATION COMMITTEE

CHAIRMAN

Already signed and stamped by

GUSNARISMAIL

Copy to:

- 1. Home Affair Minister in Jakarta
- 2. State Minister of Environment in Jakarta
- 3. Public Work/Settlement and Regional Infrastructure Minister in Jakarta
- 4. Gorontalo Governor in Gorontalo
- 5. Walikota Gorontalo in Gorontalo
- 6. Bupati Gorontalo in Limboto
- 7. The Chair of Environmental Impact Management Board in Jakarta
- 8. Japan International Cooperation Agency (JICA) Team
- 9. Achieve

D5.8 Minutes of Meeting on Draft Final Report

MINUTES OF MEETINGS

DISCUSSIONS ON THE DRAFT FINAL REPORT **FOR**

THE STUDY ON FLOOD CONTROL AND WATER MANAGEMENT IN LIMBOTO-BOLANGO-BONE BASIN IN THE REPUBLIC OF INDONESIA

AGREED UPON BETWEEN DIRECTORATE GENERAL OF WATER RESOURCES, MINISTRY OF SETTLEMENT AND REGIONAL INFRASTRUCTURE AND JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

Gorontalo, October 18, 2002

Ir. Adi Sarwoko Soeronegoro, Dipl HE

Mr. Noboru JITSUHIRO Chairman of the Steering Committee Leader of the Study Team,

Director, Penatagunaan Sumber Daya Air, Japan International Cooperation Agency

Ministry of Settlement and Regional Infrastructure

MINUTES OF MEETINGS OF DISCUSSIONS ON THE DRAFT FINAL REPORT FOR THE STUDY ON FLOOD CONTROL AND WATER MANAGEMENT IN LIMBOTO-BOLANGO-BONE BASIN IN THE REPUBLIC OF INDONESIA

- 1. Submission of the Draft Final Report: The Study Team of JICA for the Study on Flood Control and Water Management in Limboto-Bolango-Bone Basin in the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "the Study Team") submitted twenty (20) complete sets of the Draft Final Report (hereinafter referred to as "the Report") through Directorate General of Water Resources as the executing agency (hereinafter referred to as "Indonesian Side"). The Report was explained by the Study Team and discussed in the Steering Committee held in Gorontalo on 18 October 2002. Attendants to the Steering Committee are listed in ATTACHMENT-1.
- 2. Discussion on the Report: The Report presenting all the results of the Study was accepted, in principle, by the Steering Committee. Main discussions and comments raised in the meeting are as follows:
- 1) Non-structural measures are important approaches for flood damage mitigation. The committee acknowledged the importance of non-structural measures. In this regard, the Study Team will clearly mention, in the Report, the actions to be taken to initiate the activities. The Study Team will outline the schedule of the capacity building of the government agencies in the field of non-structural activities and implementation of dissemination/extension activities to the local community would be the activities to be started with.
- 2) Promotion of watershed management is one of the crucial issues of non-structural measures, especially for the conservation of Lake Limboto. The flood mitigation projects were proposed on the premise that the watershed management is implemented in the watershed area continuously. It is strongly recommended to initiate the activities for watershed management and to enhance the coordination activities for implementation of the project works, such as Land Rehabilitation and Soil Conservation (LRSC, 1999) prepared by Balai Rehabilitasi Lakan dan Konservasi Tanah (Land Rehabilitation and Soil Conservation Center).
- 3) Balai PSDA (Water Resources Management Center) based on the WATSAL concept should be established and made well-function, for the water resources management in Gorontalo Province including operation and maintenance activities of the flood mitigation facilities.
- 4) Land acquisition and compensation is another issue to be solved before the implementation of the proposed flood mitigation projects. The Study Team confirmed that the Indonesian Side will give careful considerations on this matter and take proper procedures with enough time to communicate with relevant organizations and individuals.
- 5) Public Consultation: Taking importance of public consultation (PC) in Indonesia's water resources policy, the Study Team expressed to describe more in detail, in the Main Report of the Final Report, on results of the PC meetings held three (3) times during the Study period.



- 3. Comments: The Indonesian Side will submit written comments by 18 November 2002. The Final Report will be prepared within one (1) month after JICA's receipt of the comments on the Report.
- 4. Open to Public Access of the Final Report: The Indonesian Side agreed to make the Final Report open to the public access.

(END)



ATTACHMENT-1

DAFTAR HADIR STEERING COMMITTEE MEETING THE STUDY ON FOOLD CONTROL AND WATER MANAGEMENT IN LIMBOTO-BOLANGO-BONE BASIN GORONTALO, 18 OCTOBER 2002

	No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	REMARKS				
	1	Ir. Adi Sarwoko	Direktur PSDA Dep. Kimpraswil					
L	2	Ir. Raymond Kemur, MSc.	Kasubdit Perencanaan Wil. Sungai, Dit. PSDA					
	3	Ir. A. Sembiring, Dipl. HE	KSD Perenc. Teknis SDA Wilayah Timur	Represented Mr. Ir. Imam Nugroho, Dipl.HE				
L	4	Ir. Febri Iman Harta, ME	Pinbagpro P2PSDA Jakarta					
L	5	A. Azis	Subdit Air Baku, Sungai dan Danau	Represented Mr. Ir. Bambang Hargono, M.Eng				
L	6	Ir. Dwi Puryanto, Dipl. HE	KSD PSDA / Dinas PU Kimpraswil Prov. Gorontalo					
L	7	Hiroaki Kono	JICA Study Team					
	8	Kazuchiyo Kusuda	JICA Study Team					
	9	Hitoshi Sakai	JICA Study Team					
L	10	Makoto Kodama	JICA Study Team					
L	11	Hideki Araki	JICA Study Team					
L	12	Noboru Jitsuhiro	JICA Study Team					
L	13	Suparman	JICA Study Team					
L	14	Hisashi Suzuki	JICA					
L	15	Junichi Akiyama	JICA Indonesia					
L	16	Shunichi Maeda	JICA Expert					
	17	Ir. J. Widagdo, Msi	KSD Sungai, Rawa dan Pantai Dinas Sumber Daya Air Sulut					
L	18	Ir. RH. Ari Karjanto	Pinbagpro Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Gorontalo					
L	19	Ir. Sri Hartono, ATP	Pimpro Irigasi dan Rawa Gorontalo					
	20	Ir. Hendrik Wauran	Staf Dinas SDA Sulut / Counterpart	Counterpart				
1	21	Dave Muchaimin, ST	Staf Dinas SDA Sulut / Counterpart	Counterpart				
	22	Ir. Rini Harun, SP1	Dinas PSDA Prov. Gorontalo / Counterpart	Counterpart				
1	23	Fatmawati Dangkua, ST	Staf Sub Dinas PSDA Prov. Gorontalo / Counterpart	Counterpart				
_2	4	Haris Djafar, ST	Staf Sub Dinas PSDA Prov. Gorontalo / Counterpart	Counterpart				



DAFTAR HADIR
STEERING COMMITTEE MEETING
THE STUDY ON FLOOD CONTROL AND WATER MANAGEMENT
IN LIMBOTO-BOLANGO-BONE BASIN
Gorontalo, 18 Oktober 2002

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
-	111 KOOKE LAND	Jica Study Pan	1. 25 默太田
2	Kazudiyo Kusuda	The study town	Je. De.
m		- do -	THE THE TOTAL OF THE PERSON OF
4	Suparman	1 20 1	
5	Matte Ladama	- 40 -	五一五
9	Hideki ARAKI		
7	HIGASHI SUZUKI	JIC≯	6. 1011/11/11
∞	Guidi AritANA	TICA INDONESIA	SACHE OF THE STATE
6	Shunichi MARDA	JICA EXPERT	My Sunday
10	10 ADI SARWORD	DIR. BSDA, Dix. SDA Kin Browing	10 July 10
=	A. SembIring	KSD Perene Tehm's SOA WIL TOWN-	
12	J. Widays.	PBD 874 Din 304 Put	13
13	Our Purganto	K80 PS DA (Birson PC, Keing. Gora, 13.	

DAFTAR HADIR
STEERING COMMITTEE MEETING
THE STUDY ON FLOOD CONTROL AND WATER MANAGEMENT
IN LIMBOTO-BOLANGO-BONE BASIN
Gorontalo, 18 Oktober 2002

	1					<i>t</i>	<u>j</u>					,		
TANDA TANGAN	A	14/00	15.	16. WH		18. The state of t		200	7 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	220)	24. 188 7	25.	76
JABATAN / INSTANSI	St. B. A. J. S.	(Kinhandard (inthis Was an march	COUNTERPORT / SUB DIM PSDA PROP. GORDHIALD	BABPRO BANNIR GHIN	BINDER SOR	Piubramy Papspa Jle	Pinho hapon a Cam. G.K.	Counterpart Isubalin Paint (+tl.	thets	KS Exercement NS DA Para	Il CA Studen Town	(au		
NAMA	HENDRIK WANDANI.	FATMAWATY DANK		2H. ARI RANIANTO		FOOT Han Harta	SRI HARTONO	Riny Harun		Buymod (lam	Noboru JITSUHIRD			
NO.	14	15	16	17	18	19	70	21	22	23	24	25	26	

